

Jalan Baru
**MODERASI
BERAGAMA**

Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir

- Abdul Aziz
- Agung Danarto
- Ahmad Muttaqin
- Ahmad Najib Burhani & Muhammad Nur Prabowo Setyabudi
- Ahmad Norma Permata
- Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
- Andar Nubowo
- Andi Afdhal
- Ari Susanto
- Biyanto
- Budiman Tanuredjo
- Elga J. Sarapung
- Hamzah Sahal
- Hasnan Bachtiar
- Hilman Latief
- Husein Ja'far Al Hadar
- Ismail Fahmi
- Jumartono
- Kardinal Ignatius Suharyo
- Maria Hastiningsih
- Mu'arif
- Muhammad Najib Azca
- Muhammad Ridho Basri
- Pradana Boy ZTF
- Siti Ruhaini Dzuhayatin
- Sudhamek AWS

Editor:
Fajar Riza Ul Haq & Azaki Khoirudin



DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR:	
JALAN BARU MODERASI BERAGAMA	ix
 BAGIAN 1: KOMITMEN MODERASI	
1. HAEDAR NASHIR: MENATA IDEOLOGI GERAKAN MUHAMMADIYAH DENGAN JURNALISME INTELEKTUAL <i>Hilman Latief</i>	1
2. HAEDAR NASHIR: PENJAGA GAWANG IDEOLOGI MUHAMMADIYAH <i>Ahmad Najib Burhani & Muhammad Nur Prabowo Setyabudi</i>	16
3. HAEDAR NASHIR, IDEOLOG YANG MODERAT DALAM PIKIRAN DAN TINDAKAN <i>Biyanto</i>	36
4. HAEDAR NASHIR, KOMITMEN MODERASI, DAN ARAH BARU KONSOLIDASI MUHAMMADIYAH <i>Ahmad-Norma Permata</i>	55
5. HAEDAR NASHIR DAN MODERASI POLITIK MUHAMMADIYAH: PENGHELA, NARRATIVE MAKER & WALK THE TALK <i>Siti Ruhaini Dzuhayatin</i>	86
6. HAEDAR NASHIR & AKTUALISASI ISLAM BERKEMAJUAN DI MASA WABAH COVID-19 <i>Ahmad Muttaqin</i>	112
7. MEMUHAMMADIYAHKAN SEMESTA: TONGGAK BARU INSTITUSIONALISASI ISLAM BERKEMAJUAN DI FORUM GLOBAL <i>Andar Nubowo</i>	149
8. HAEDAR NASHIR MEDORASI BERAGAMA, DAN AKTIVISME DI MEDIA SOSIAL <i>Ismail Fahmi, Ph.D.</i>	175



HAEDAR NASHIR & AKTUALISASI ISLAM BERKEMAJUAN DI MASA WABAH COVID-19

Ahmad Muttaqin

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bercorak moderat sekaligus modern di Indonesia. Pak Haedar terpilih pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, kemudian terpilih kembali di periode kedua pada Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022. Muktamar ini seharusnya dilaksanakan pada 2020. Karena badai pandemi Covid-19, Muktamar terpaksa diundur selama dua tahun. Hal ini karena Muhammadiyah konsisten dengan pemahaman agama yang rasional, sehingga selama dua tahun lebih fokus melakukan kerja-kerja intelektual dan kemanusiaan untuk mengatasi pandemi. Selain membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC), Muhammadiyah aktif memberikan bimbingan dan tuntunan keagamaan pada masa darurat Covid-19. Tulisan ini akan melihat peran Pak Haedar bersama Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan modern dengan semangat "Islam Berkemajuan" dalam menghadapi wabah Covid-19. Dengan kata lain, tulisan ini hendak mengelaborasi peran proaktif

Muhammadiyah dalam merespons wabah Covid-19 melalui perspektif Islam Berkemajuan yang mengintegrasikan agama, sains, dan budaya.

Agama dan Wabah Covid-19

Wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) memicu perubahan cara hidup manusia, bahkan dapat dikatakan telah mempercepat fenomena disrupsi di seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan agama yang kemudian menciptakan *new normal* (kenormalan baru), *new norms* (tata aturan baru) atau *new culture* (budaya baru). Hal ini dikarenakan segala aktivitas kehidupan manusia dituntut melakukan "protokol kesehatan" seperti: (1) mencuci tangan; (2) penggunaan *hand sanitizer*; (3) menggunakan masker; (4) menjaga jarak (*social* dan *physical distancing*); (5) menghindari berkerumun; (6) bekerja, belajar, dan beribadah di rumah dan seterusnya. Praktik ritual keagamaan (*ibadah*) pun terdampak –terpaksa berubah– karena wabah, seperti: penutupan masjid, ibadah dialihkan ke rumah, bahkan dilaksanakan secara virtual. Situasi ini benar-benar memaksa umat beragama untuk beradaptasi dan mengubah kebiasaan pemikiran dan praktik beribadah dengan kebiasaan baru, seperti: shaf salat berjarak, salat memakai masker, selalu membawa sajadah, menyiapkan *hand sanitizer*, dan cek suhu tubuh.

Ironinya, cara berpikir, mentalitas, budaya, perilaku, dan emosi masyarakat umumnya masih sangat lekat dengan tradisi keagamaan (*religion*) bercorak paguyuban. Tradisi masyarakat berhadap-hadapan secara langsung dengan protokol kesehatan yang diadopsi dari cara berpikir ilmu pengetahuan kesehatan (*medical sciences*). Sementara budaya masyarakat yang umumnya kental-menyatu dengan ajaran atau tradisi agama sulit sekali menerima budaya berpikir baru yang berdasarkan patokan sains modern yang dilaksanakan secara ketat tanpa dialog dan kompromi. Dengan kata lain, protokol kesehatan tersebut benar-benar bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) yang gemar dan terbiasa ramai-ramai berkumpul, baik di pasar, arisan, kondangan, dan perkawinan. Kebiasaan masyarakat

paguyuban Muslim lebih banyak lagi, seperti salat jemaah di masjid, salat Jumat, salat tarawih, salat hari raya idul fitri atau idul adha baik di masjid atau di lapangan terbuka, ibadah haji dan umrah, salat jenazah, mengantar jenazah sampai tempat pemakaman, *tahlilan*, dan seterusnya (Abdullah, 2020). Padahal, suka atau tidak suka, masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman dan sikap keberagamaan yang fleksibel-moderat dan adaptif-adoptif. Akan tetapi, kebanyakan penafsiran baru tentang agama kehilangan daya kesetimbangan (*al-tawazun*), fleksibilitas (*cognitive flexibility*) atau elastisitas dan daya lenturnya, maka ia akan mudah terjebak dan terseret ke dalam pusaran arus disrupsi (Abdullah, 2017).

Beberapa penyebaran Covid-19 di berbagai tempat terkait erat dengan acara keagamaan yang melibatkan banyak jemaah. Sebut saja Jemaah Gereja Shincheonji Yesus di Korea Selatan yang dianggap sebagai pemicu ledakan penyebaran virus Corona baru tersebut. Di Malaysia, salah satu kegiatan keagamaan yg dinilai sebagai pemicu ledakan gelombang kedua penyebaran Covid-19 adalah ijtima Tablig Akbar di Kuala Lumpur pada 27 Februari – 1 Maret 2020 yang melibatkan 16.000 jemaah. Di Indonesia salah satu klaster penyebaran Covid-19 adalah seminar keagamaan Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Lembang, Jawa Barat, yang dihadiri tidak kurang dari 2.000 jemaah. Di Amerika Serikat, sebagaimana ditulis Elizabet Yuko, kasus positif Covid-19 pertama pada awal Maret 2020 di Washington DC terjadi pada salah seorang pendeta setelah memberikan pelayanan pada sekitar 550 orang, berjabatan tangan dan membagikan komuni kepada jemaat Grace Church di Georgetown. Di New York, salah satu titik episentrum penyebaran Covid-19 adalah New Rochelle, yang di dalamnya terdapat Synagogue Orthodox, Young Israel of New Rochelle, dengan setidaknya 1 rabi dan seorang jemaah telah terjangkit Covid-19 pada awal Maret.

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan begitu lekatnya antara ritual keagamaan kolektif (jemaah) dengan kasus penyebaran Covid-19. Sebagian pemimpin dan umat beragama kadang begitu percaya diri menyatakan bahwa mereka akan dilindungi oleh Tuhan dari wabah Covid-19. Ritual jemaah yang mereka jalankan

diklaim sebagai cara mendekatkan diri pada Tuhan dalam rangka memperoleh lindungan dan pertolongan. Namun, di mata praktisi kesehatan, penyelenggaraan ritual keagamaan kolektif yang dijanjikan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang berpotensi menjadi medan penyebaran virus corona baru tersebut. Beberapa kasus yang disebut di atas menjadi bukti nyata.

Menariknya, wabah Covid-19 ini direspons dan disikapi secara beragam oleh organisasi keagamaan. Ada kelompok keagamaan yang meremehkan terhadap tingkat bahaya wabah ini dan menganggapnya sebagai konspirasi kelompok tertentu untuk menguasai dunia. Dengan gagah mereka yang meremehkan ini mengatakan kami tidak takut Covid-19, keimanan kami akan mampu menangkal ancaman virus tersebut. Ada juga kelompok yang abai dan masa bodoh serta cenderung meremehkan seruan pakar kesehatan, pimpinan organisasi keagamaan di tingkat pusat dan pemerintah. Namun, ada organisasi dan kelompok keagamaan yang menyikapi secara serius dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Dua kelompok pertama ini baru menyadari bahaya Covid-19 setelah diketahui sebagian dari anggota kelompoknya terpapar, sakit hingga ada yang meninggal. Beberapa jemaat gereja dan jemaah masjid serta anggota kelompok keagamaan tertentu bahkan diketahui menjadi klaster penyebaran Covid-19 akibat sikap meremehkan dan abai terhadap ancaman pandemi ini.

Di Indonesia, saat Covid-19 mulai mewabah di awal tahun 2020, salah satu *epicentrum* penyebarannya adalah Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia. Untuk mencegah agar penyebaran virus tidak makin parah, Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan berbagai langkah dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis. Tanggal 19 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama-sama pimpinan lembaga agama (MUI, DMI, PGI, Walubi, PHDI, dan Uskup Agung Jakarta) mengimbau agar umat beragama di wilayah DKI Jakarta untuk sementara waktu menunda pelaksanaan peribadatan jemaah di rumah ibadah dan menyerukan agar beribadah di rumah-masing.

Tokoh dan pimpinan ormas keagamaan sudah menegaskan bahwa di saat wabah seperti ini umat beragama agar terus lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, dan beribadah. Caranya saja yang berubah dari biasanya dilaksanakan bersama secara kolektif, berjemaah di masjid, musala, gereja, kelenteng, kuil, pura, dll., menjadi lebih terbatas, dilaksanakan di rumah, berjemaah bersama keluarga. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara kolektif/berjemaah di suatu tempat seperti misa, pengajian, doa bersama, khataman Al-Qur'an, istighosah, dan lain-lain saat ini dilaksanakan secara daring/*online*. Beberapa majelis taklim pun menggelar pengajian kitab kuning secara *online*. Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengimbau untuk tidak menyelenggarakan peribadatan di gereja dan mengembangkan peribadatan virtual atau *e-Church*.

Namun, tidak semua jemaah taat dan mengikuti imbauan dari organisasi induknya. Di level jemaah tidak sedikit yang membangkang dan tetap salat jemaah dan jumatatan di masjid. Bahkan, di antara mereka justru menganggap pimpinan ormas dan tokoh-tokoh agama yang menyarankan penyelenggaraan ibadah di rumah kurang kuat imannya, lebih takut pada virus ciptaan Tuhan dari pada Tuhan itu sendiri. Mereka dinilai terlalu mengandalkan pendekatan sains sekuler, dan tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Di kalangan umat yang tidak taat seruan dan imbauan untuk *stay at home* dan *pray at home* ada semacam kecurigaan dan kekhawatiran terhadap protokol *social & physical distancing* sebagai bentuk "penggembosan" semangat keberagamaan yang berimplikasi pada *God distancing* (semakin berjaraknya manusia dengan Tuhan).

Secara organisatoris, ketidaksejajaran antara kebijakan induk organisasi keagamaan dengan jemaah di akar rumput semacam tersebut dapat menjadi faktor perpecahan organisasi keagamaan karena perbedaan persepsi dalam memaknai dan menyikapi wabah. Secara teologis, hal tersebut juga menandakan bahwa dalam menyikapi wabah dan peristiwa-peristiwa alam lainnya masih banyak umat beragama yang memisahkan antara nalar agama dan nalar sains dan *theology fatalistic/jabbariyah* lebih dominan dibandingkan teologi rasional. Apakah hal ini implikasi

dari lemahnya pengembangan sains dan teknologi di masyarakat, tentu perlu penelitian lebih lanjut.

Respons Muhammadiyah terhadap Covid-19

Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan tahun 1912 dan dikenal sebagai organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, termasuk yang sejak awal mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan terprogram terhadap wabah Covid-19. Muhammadiyah mengeluarkan maklumat, membentuk tim yang bertugas mengoordinasikan program dan aksi penanggulangan Covid-19 secara nasional, serta aktif mengeluarkan tuntunan keagamaan di masa wabah. Langkah proaktif Muhammadiyah secara organisatoris ini tidak jarang berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Misalnya, Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk tidak secara gegabah melakukan kebijakan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan alasan ekonomi semata. Muhammadiyah juga tidak setuju dengan istilah "*new normal*" yang digunakan pemerintah dan menawarkan istilah lain yang lebih sesuai, seperti "*new reality*". Ketidaksetujuan Muhammadiyah dengan kebijakan pemerintah yang dinilai sembrono ternyata di kemudian hari dibenarkan pemerintah sebagaimana tergambar dalam meme kliping media yang tersebar di sosial media berikut ini:

Tuntunan keagamaan darurat masa wabah Covid-19 yang dikeluarkan PP Muhammadiyah tidak jarang dicemooh oleh kelompok-kelompok lain yang berbeda sudut pandang, bahkan beberapa warga dan pimpinan Persyarikatan di tingkat bawah ada yang menyangkal dan mendelegitimasi edaran dan tuntunan tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan seberapa didengar edaran dan tuntunan keagamaan PP Muhammadiyah tersebut serta menimbulkan kekhawatiran kemungkinan semakin redupnya otoritas keagamaan organisasi modernis ini di tengah situasi VUCA (*Volatility/perubahan cepat, Uncertainty/ketidakpastian, Complexity/kompleksitas, Ambiguity/kebingungan*).

Riset dan kajian tentang Muhammadiyah sudah tidak terhitung jumlahnya. Dari latar belakang pengkajinya, literatur dan kajian tentang Muhammadiyah dapat diklasifikasikan menjadi dua rumpun. Pertama adalah kajian dan literatur yang ditulis oleh *insider* Muhammadiyah. Masuk dalam rumpun ini adalah kajian tentang Muhammadiyah dari berbagai aspek yang dilakukan oleh pimpinan, kader, anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Di antara yang aktif menulis dan mengkaji Muhammadiyah dan ortomnya dari perspektif *insider* adalah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini, Abdul Munir Mulkhan, Amin Abdullah, Abdul Mukti, Achmad Jaenuri, Najib Burhani, Hilman Latief, Syamsiyatun, Ruhaini, dll. Meski mereka adalah *insider*, tetapi dalam menulis tentang Muhammadiyah tidak kehilangan daya objektivitas sehingga karya-karya mereka tetap kritis, akademis, dan reflektif. Tulisan dan kajian mereka tentang Muhammadiyah terbentang dari aspek ideologi, pemikiran, sejarah sosial, filantropi, pendidikan, dan interaksi dengan kelompok lain, hingga gerakan keagamaan pada aras global.

Rumpun kedua adalah kajian tentang Muhammadiyah yang dilakukan oleh *outsider*, bukan anggota, bukan kader dan bukan pimpinan Persyarikatan. Di antara *outsider* pengkaji Muhammadiyah ini adalah ilmuwan Barat atau bukan warga negara Indonesia; yang cukup menonjol di antaranya James Peacock, Nakamura, Hyung Jum Kim, Herman L. Beck, dll. Mereka mengkaji Muhammadiyah dari aspek historis, sosiologis, antropologis, serta gerakan keagamaan.

Dilihat dari segi tema, kajian tentang Muhammadiyah dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok. Kajian tentang ideologi dan pemikiran Muhammadiyah antara lain dapat ditemui dalam tulisan Peacock (1978), Jaenuri (1997, 2007), Abdullah (2001, 2002, 2007, 2010, 2019), dan Nashir (2007, 2010, 2015a, 2015b, 2018). Kajian tentang sejarah dan dinamika gerakan secara sosiologis, antropologis, politis, untuk menyebut beberapa yang menonjol, dilakukan oleh Nakamura (2012), Mulkhan (1990, 2000, 2010), Kim (2007), Alfian (1989), Burhani (2005, 2019). Kajian tentang pendidikan dan relasi Muhammadiyah dengan umat agama lain

di antaranya dilakukan oleh Mukti dan Fajar (2009), Mukti (2019a, 2019b) serta Shihab (1998); tentang filantropi antara lain oleh Latief (2012), Nashir dan Latief (2020), tentang sufisme dan spiritualitas oleh Masyitoh (2008), Beck (2014), Biyanto (2017), dan Muttaqin, dkk. (2023), serta tentang gender dan perempuan oleh Syamsiatun (2007, 2008), Ruhaini (2015), dan Ro'fah (2016).

Masih banyak kajian tentang Muhammadiyah dalam bentuk skripsi, tesis, *proceeding*, tulisan di jurnal ilmiah yang jumlahnya ribuan. Sebagai ilustrasi banyaknya kajian tentang Muhammadiyah, penulis mengetik kata "Muhammadiyah" dalam mesin pencari informasi di *google scholars*. Dalam waktu 0,09 detik, telah muncul 814.00 entri. Di antara kajian-kajian tentang Muhammadiyah yang telah ada, sebatas yang penulis ketahui, hingga kini sulit menemukan kajian tentang Muhammadiyah dari perspektif agama, sains, dan budaya dalam praksis keagamaan, terutama terkait dengan pandemi Covid-19.

Kajian tentang peran Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan dalam merespons wabah Covid-19 telah ditulis oleh Najib Burhani (2020) dengan judul "*Comparing Tabligh Jamaat and Muhammadiyah Responses to Covid-19*". Menurut Burhani, Muhammadiyah merupakan contoh organisasi keagamaan yang mampu merespons wabah Covid-19 secara positif melalui "Jihad Kemanusiaan", tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah dengan berbagai upaya konkret mulai dari kampanye hidup sehat, tuntunan keagamaan, hingga mengerahkan segala sumber daya kader, ortom dan lembaga kesehatan dan pendidikannya untuk terlibat aktif memerangi wabah. Peran proaktif Muhammadiyah ini merupakan hasil dari orientasi keagamaan yang *inner wordly*. Sebaliknya, jemaah tablig yang bersuara menolak imbauan pembatasan ibadah di masjid serta kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa banyak merupakan contoh respons pasif dan fatalistik dalam menghadapi bencana. Hal itu salah satu akibat dari orientasi keagamaan mereka yang selama ini cenderung *other worldly*.

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, tulisan ini menelaah proses integrasi antara agama, sains, dan budaya dalam tuntunan

dan praksis keagamaan Muhammadiyah masa wabah Covid-19. Penulis berasumsi bahwa karakter moderat para aktivis, pimpinan, dan corak keberagaman Muhammadiyah memengaruhi keberhasilan pengintegrasian tersebut. Kajian ini fokus pada tiga pokok masalah: *pertama*, bagaimana ormas Islam yang mem-framing dirinya sebagai gerakan Islam yang berkemajuan merespons pandemi Covid-19. *Kedua*, dilihat dari perspektif integrasi dan interkoneksi keilmuan, sejauh mana dialektika nalar agama dan nalar sains digunakan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam memberikan tuntunan keagamaan di masa wabah? *Ketiga*, mengapa muncul beragam respons dari warga Persyarikatan terhadap tuntunan ibadah masa wabah dari PP Muhammadiyah tersebut, apa implikasinya terhadap otoritas keagamaan ulama dan pimpinan Muhammadiyah, dan budaya baru apa yang mungkin muncul dari inovasi praksis keagamaan di masa wabah?

Menghadapi wabah Covid-19, Muhammadiyah telah mengerahkan segala sumber dayanya untuk memerangi dan menanggulangi wabah Covid-19 sebagai bentuk "Jihad Kemanusiaan" (Muis, 2020). Melalui Maklumat nomor 02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) PP Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19. Pembentukan MCCC ini bertepatan dengan waktu Pemerintah RI menetapkan Virus Corona sebagai bencana nasional, tanggal 14 Maret 2020, atau 12 hari sejak kasus pertama pasien positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. MCCC merupakan tim yang terdiri dari perwakilan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), 'Aisyiyah, Lazismu, Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (Dikti Litbang), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Majelis Tabligh, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyiatul 'Aisyiyah (NA), Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM), dan Pemuda Muhammadiyah. Selain di tingkat pusat, MCCC juga dibentuk di tingkat wilayah dalam bentuk satuan tugas dan sudah ada di 30 wilayah Indonesia. MCCC

juga bekerja sama dengan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Kiprah Muhammadiyah dalam menghadapi wabah Covid-19 lebih detail didokumentasikan oleh Tim Diseminasi Informasi dan Publikasi MCCC dalam bentuk *e-book* berjudul *Optimis Menghadapi Pandemi Covid-19: Catatan Kajian dan Respon Muhammadiyah* (2020).

Laporan MCCC tanggal 31 Desember 2020, atau hampir 10 bulan tim ini beraktivitas, telah berhasil melakukan kegiatan seperti pembagian APD (*masker, hand sanitizer, disinfektan*), peralatan medis dan APD medis, bantuan makanan dan sembako, sosialisasi dan edukasi, pembuatan media edukasi, pelayanan pasien yang dirawat di rumah sakit, subsidi pulsa untuk mahasiswa, subsidi biaya studi, diskusi *online*, pelayanan psikososial, dll., dengan total dana yang dikeluarkan tidak kurang Rp308,4 miliar (di luar biaya perawatan di RS Muhammadiyah–Aisyiyah) dan penerimaan manfaat lebih dari 28,5 juta jiwa. Kiprah ini telah menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi paling peduli dalam mitigasi Covid-19 di Indonesia. Apresiasi ini misalnya dilakukan oleh Lembaga Kajian Strategi Pembangunan (LKSP), sebuah lembaga kajian berbasis *big data* untuk merumuskan pembangunan, bemarkas di Jakarta yang berdasar hasil surveinya menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan ormas yang paling peduli terhadap pandemi Covid-19. (Lihat <https://lksp.or.id/kajian/survei-lksp-muhammadiyah-dan-pks-dipersepsi-lebih-peduli-saat-pandemi/>).¹

Dalam pidato 18 November 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Muhammadiyah mengatasi masalah kesehatan di masa pandemi. Kiprah nyata Muhammadiyah itu dilakukan melalui tim khusus Muhammadiyah Covid-19 Command Center, pelayanan di 82 rumah sakit di provinsi-provinsi. Di tengah krisis kesehatan publik, bermuhammadiyah secara benar adalah berislam secara rasional, saintifik, dan

¹ Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19 berakhir pada 21 Juni 2023 melalui Keppres Nomor 17/2023. Enam bulan sebelum pandemi Covid-19 secara resmi dinyatakan berakhir, pada 31 Desember 2022, MCCC melaporkan total penilaian manfaat dari program-program MCCC sebanyak 48.091.320 jiwa, dengan total nilai program Rp1.0005.884.0888.686.

berorientasi pada kesehatan publik (*public health*). Berislam secara rasional dan modern berakar kuat dalam tradisi Muhammadiyah. Sejak awal, Ahmad Dahlan meletakkan fondasi rasionalisme dalam gerakan pembaruan Islam.

Di tengah kepongahan "pemimpin umat" yang berpikir tak rasional, bersikap antisains, bahkan melibatkan diri pada arak-arakan massal di jalanan, Haedar justru tampil sebagai pemimpin gerakan modern Islam terbesar yang berpikir rasional dalam beragama, bersikap positif pada sains, dan menunjukkan ketaatan penuh pada protokol kesehatan publik. Haedar berikhtiar menggerakkan Muhammadiyah sebagai instrumen pencerahan publik agar warga Persyarikatan dapat memberikan teladan yang terbaik dalam ikhtiar bersama mengatasi penyebaran virus berbahaya ini, bukan justru menjadi bagian dari komunitas keagamaan yang memperkeruh krisis kesehatan publik (Sukidi, 2021).

Di tengah angka kasus Covid-19 yang terus naik, Pak Haedar mengingatkan umat Islam bahwa krisis kesehatan publik ini belum berakhir meskipun vaksin sudah ditemukan, dan karena itu, semua pihak harus tetap waspada. Jangan abai, bertindak tidak disiplin. Karena menyangkut keselamatan jiwa orang lain. Jika belum memberikan solusi, setidaknya jangan membikin masalah. Pesan tajam dan lugas ini tetap disampaikan secara santun kepada mereka abai dan tidak disiplin. Sebagai pemimpin gerakan Islam Berkemajuan, Pak Haedar tampil ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang solutif bagi penanganan Covid-19. Hal ini konsekuensi logis dari paham Muhammadiyah yang menganut Islam rasional yang pro-sains dan temuan ilmiah.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Muhammadiyah dilandasi etos yang memadukan keimanan, sains, dan amal saleh dalam suatu organisasi. Upaya awal Kiai Dahlan untuk menggeser garis salat Masjid Raya Kauman agar lebih tepat menghadap kiblat dengan menggunakan peta, hanyalah salah satu contoh penerapan sains agama pada masa itu. Pilihan untuk menggunakan instrumen organisasi sebagai media aktualisasi keimanan berdasarkan akal sehat yang berakar pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaan amal saleh dijunjung tinggi oleh banyak orang.

Melalui organisasi nalar modern dan nalar agama Muhammadiyah menunjukkan perannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan filantropi.

Tidak sedikit pengamat dan penulis *outsider* Muhammadiyah yang kurang tepat dalam menilai Muhammadiyah. Hanya karena irisan corak pemurnian atau puritan dalam pandangan dan praktik keagamaan, tidak jarang Muhammadiyah dikategorikan sebagai gerakan Salafi, ada yang menyebutnya Wahabi. Padahal, jika dicermati dalam dokumen-dokumen resmi organisasi, Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang memadukan antara wahyu dan akal dalam nalar dan praktik keagamaan. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah butir 3, misalnya, menyebutkan bahwa Muhammadiyah dalam paham agamanya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah maqbulah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai jiwa ajaran Islam. Rumusan langkah MKCH butir ke-3 ini adalah:

Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:
 (a) Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. (b) Sunnah Rasul: Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. (Manhaj Gerakan Muhammadiyah, 2009: 51).

Berdasar rumusan ini jelas bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, beragama itu tidak hanya berlandaskan pada dalil-dalil nash/teks suci keagamaan secara tekstual dan literal, tetapi juga akal pikiran. Di bagian akhir rumusan MKCH poin ke-3 tersebut secara eksplisit disebutkan "... menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam." Frasa ini menegaskan bahwa penggunaan akal pikiran dalam beragama tidak semata-mata berdasar akal atau nalar spekulatif, tetapi akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Karena Islam itu sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, maka akal pikiran yang digunakan

berbasis pada hasil riset akademis yang ilmiah.

Tuntunan untuk menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam beragama juga dapat dijumpai dalam dokumen Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Pedoman ini menuntun warga Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan: kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa, bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan dalam seni dan budaya.

Pemaduan wahyu dan akal dalam nalar dan praktik keagamaan Muhammadiyah ini diperkuat dengan manhaj tarjih-nya yang memadukan tiga unsur: *burhani* (teks suci keagamaan), *bayaani* (fakta empiris berbasis ilmu pengetahuan), dan *irfani* (hati suci dan pertimbangan ihsan/etis bagi manusia dan alam).

Secara praksis dan sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah dan berbagai amal usahanya merupakan implementasi keimanan dan amal saleh yang dibingkai dalam organisasi yang modern. Dalam perspektif ini, persoalan kehidupan dunia yang ada tidak untuk dihindari dan dijauhi, tetapi didekati dan dipecahkan melalui amal berjemaah (kolektif-kolegial). Fatwa dan seruan keagamaan yang dimunculkan selalu dilihat secara holistik, tidak hanya mengedepankan nalar agama (*bayani*), tetapi juga dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan sains dan teknologi (*burhani*), serta pertimbangan ihsan dan etis-spiritual demi kemaslahatan bersama (*irfani*). Karena itulah sejak Muktamar Muhammadiyah 1 Abad di Yogyakarta tahun 2010, Muhammadiyah mengusung gagasan "Islam Berkemajuan". Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (*azhawahir al-afkar al-muhammadiyah li al-qarni al-tsani*), yang merupakan Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46) antara lain disebutkan: "Islam sangat menjunjung tinggi amal sejajar dengan iman dan ilmu, sehingga Islam hadir dalam paham keseimbangan sekaligus membumi dalam kehidupan" (PP Muhammadiyah, 2015: 8).

Apabila digali dari sejarah panjang Muhammadiyah sejak berdiri hingga saat ini, di antara etos Muhammadiyah adalah integrasi antara iman, ilmu, dan amal saleh dalam wadah organisasi (*jam'iyah*). Langkah Kiai Dahlan yang menggeser shof masjid Gede Kauman agar lebih persisi menghadap kiblat dengan menggunakan peta, merupakan jejak implementasi ilmu/sains dalam beragama pada waktu itu. Pilihan menggunakan instrumen organisasi sebagai media aktualisasi keyakinan (iman) yang dilandasi akal sehat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi amal saleh merupakan pilihan tepat. Melalui organisasi modern inilah Muhammadiyah menunjukkan perannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pananggulangan bencana dan filantropi. Meski belum berhasil menjadi gerakan ilmu yang masif memproduksi paradigma pengetahuan, Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dapat dikategorikan sebagai Amal Ilmiah Muhammadiyah sebab kedua bidang AUM tersebut dikelola secara profesional yang mengedepankan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh etika dan prinsip ajaran Islam menurut perspektif Muhammadiyah.

Tuntunan Ibadah di Masa Pandemi

Dalam konteks memberikan tuntunan keagamaan di masa wabah, hingga akhir Juni 2020, PP Muhammadiyah telah mengeluarkan beberapa maklumat, edaran, dan tuntunan keagamaan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya. Lebih tepatnya, PP Muhammadiyah yang berinisiatif meminta agar Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa ibadah selama pandemi. Maklumat dan edaran tersebut meliputi tuntunan ibadah selama pandemi Covid-19 seperti tata cara ibadah di rumah, ibadah Ramadhan dan Idul Fitri serta tuntunan Idul Adha dan Ibadah Kurban di masa wabah.

1. Ibadah di Rumah dan Ramadhan di Masa Pandemi

Tuntunan ibadah di rumah masa pandemi pertama kali dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah melalui Surat Maklumat Nomor

02/MLM/L0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 19 Rajab 1441 H bertepatan 14 Maret 2020 M. Maklumat tersebut berisi 5 poin: (1) penundaan kegiatan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang melibatkan massa atau orang banyak seperti pengajian, seminar, pertemuan, kegiatan dan sosial; (2) kegiatan ibadah keagamaan; (3) kegiatan pendidikan agar diselaraskan dengan kebijakan pemerintah; (4) Amal usaha kesehatan agar menyiapkan penanganan Covid-19, sinergi antara Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dengan majlis, lembaga, ortom, dan AUM lain serta penegasan PP Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC); dan (5) anjuran menjalani pola hidup sehat warga Muhammadiyah, dan anjuran warga untuk membatasi bepergian ke tempat yang berisiko penularan Covid-19.

Terkait dengan kegiatan ibadah selama pandemi, disebutkan dalam poin 2 maklumat yang berbunyi:

“Kegiatan ibadah seperti salat berjemaah dan salat jumat di masjid tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Bagi yang sakit disarankan untuk beribadah di rumah. (b). Apabila dipandang darurat, pelaksanaan sholat jumat dapat diganti dengan sholat dhuhur di rumah, dan pelaksanaan salat jemaah dapat dilaksanakan di rumah.”

Poin nomor 5 tentang anjuran tidak bepergian ke daerah yang berisiko penularan Covid-19 disertai dengan kutipan hadis dari Usamah bin Zaid Riwayat Bukhari dan Muslim tentang Tha'un (penyakit menular) sebagai ujian bagi hamba Allah dan larangan untuk tidak masuk ke wilayah yang terkena wabah, dan larangan keluar wilayah bagi warga yang tinggal di wilayah wabah. Disertakan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang larangan Nabi untuk tidak mencampuradukkan antara yang sakit dan yang sehat; serta hadis tentang larangan berbuat madharat dan hal-hal yang menimbulkan madharat, riwayat Ibn Majah dan Ahmad bin Hambal dari Abdullah bin Abbas.

Hadis-hadis yang dikutip dalam maklumat tersebut merupakan dalil bagi penanganan wabah penyakit menular melalui karantina wilayah atau yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *lock down*, PSBB, dan istilah lain terkait.

Mempertimbangkan data statistik tentang kasus Covid-19 yang terus meningkat dan merembet ke beberapa wilayah di Indonesia, maka pada tanggal 20 Maret 2020 PP Muhammadiyah mengeluarkan imbauan salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah, dan salat fardu jemaah di rumah. Edaran dan imbauan juga diikuti dengan berbagai forum pengajian *online* baik yang digelar oleh Majelis Tarjih maupun oleh Amal Usaha Muhammadiyah.

Tanggal 24 Maret 2020, PP Muhammadiyah kembali mengeluarkan Edaran Nomor: 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 yang dilengkapi dengan lampiran tuntunan ibadah dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan dari Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/H/2020 tentang wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Nomor 03/I.0/B/2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Fardu Berjemaah Saat Terjadi Wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19). Tuntunan ibadah tersebut hasil rapat bersama antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).

Secara rinci lampiran edaran tersebut memuat 19 poin tuntunan mulai dari aspek keimanan/keyakinan/akidah dalam memandang dan menyikapi Covid-19, tuntunan untuk terus aktif berusaha/ikhtiar dalam mencegah dan mananggulangi Covid-19, tuntunan menjalankan ibadah keagamaan yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi, serta tuntunan amalan-amalan yang dianjurkan di waktu pandemi sebagai usaha spiritual memperkuat iman dan solidaritas sosial.

Sebelum masuk 19 poin tuntunan ibadah, dijelaskan nilai dasar keimanan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan tentang tuntunan ibadah di masa pandemi ini, antara lain: *Pertama* adalah keimanan bahwa apa pun yang menimpa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Yang Mahakuasa Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim. Segala musibah merupakan ujian dari Allah yang memiliki hikmah di baliknya. Manusia hendaknya menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menghindari merusak lingkungan dan mengundang penyakit sebab fungsi kosmik manusia adalah memakmurkan alam.

Kedua, konsekuensi dari keimanan pada Allah tersebut, dalam menghadapi musibah manusia harus optimistis dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dengan melakukan ikhtiar maksimal mencari solusi dan menghindari berbagai sumber kemadharatan dengan tetap bertawakal pada Allah. "Nasib manusia itu ada di tangan manusia itu sendiri dan apa yang diperolehnya tidak lain adalah hasil usahanya dan Allah tidak akan mengubah nasibnya sebelum ia mengubah keadaan dirinya sendiri."

Ketiga adalah tentang prinsip agama itu diturunkan untuk rahmat bagi semesta alam dan membawa kemaslahatan dalam bentuk perlindungan terhadap manusia, kehidupan keagamaannya, jiwa raganya, akal pikirannya, institusi keluarganya dan harta kekayaannya. Pelaksanaan ajaran agama di masa Covid-19 hendaknya mengutamakan untuk menghindari kemadharatan dan memberikan kemudahan.

Sembilan belas poin tuntunan ibadah di masa wabah Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Lima poin pertama terkait dengan pandangan teologis; aspek keimanan dan akidah dalam memandang dan menyikapi wabah meliputi: (1) keyakinan bahwa "wabah Covid-19 adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat Rahman dan Rahim Allah, sehingga umat Islam harus menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar". (2) "Pasien Covid-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid." (3) "Usaha aktif mencegah penularan Covid-19 merupakan

bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan sebaliknya tindakan sengaja yang membawa pada risiko penularan merupakan tindakan buruk/zalim." (4) "Upaya pengobatan sebagai bentuk ikhtiar wajib dilakukan. Oleh sebab itu, para ahli termasuk dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan upaya tersebut sekaligus menyediakan segala keperluan yang berkaitan dengannya." (5) "Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya Covid-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'i / social distancing*) maupun upaya *stay at home* atau *work from home* sebagai tindakan preventif, dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja."

Tujuh poin berikutnya tentang ibadah; menjelaskan hukum salat fardu yang wajib dilaksanakan dalam kondisi apa pun, dalam rangka implementasi *social distancing* dan menghindari *madharat* penularan virus Covid-19, maka pelaksanaan salat fardu dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak di musala atau masjid; kebolehan untuk menjamak salat bagi petugas medis yang sedang bertugas; salat Jumat diganti dengan salat zuhur empat rakaat di rumah masing-masing; tuntunan mengganti lafal *hayaa 'ala shalah* dengan *shollu fii buyutikum* atau *shallu fii rihalikum*; tuntunan ibadah di bulan Ramadhan yang meliputi salat tarawih di rumah masing-masing, puasa tetap wajib dilaksanakan kecuali bagi yang sakit, tenaga medis yang karena beratnya beban tugas dan kerja dibolehkan tidak puasa, tetapi wajib mengqadha di lain waktu, dan apabila saat Idul Fitri penyebaran Covid-19 belum mereda maka salat Idul Fitri dan rangkaianannya (mudik, pawai takbir, halal bilhaalal, dan lain-lain.) tidak diselenggarakan.

Dua poin berikutnya tentang perilaku ihsan dan solidaritas sosial, terkait dengan tuntunan untuk meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui: "memperbanyak zakat, infak, dan sedekah serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dan menggalakkan sikap berbuat baik (*ihsan*) dan saling menolong (*ta'awun*) di antara warga masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, misalnya berbagi masker, *hand sanitizer*, atau mencukupi kebutuhan pokok dari

keluarga yang terdampak secara langsung dan tidak melakukan *panic buying* (pembelian barang karena panik/penimbunan barang berdasarkan rasa takut)."

Tiga poin berikutnya berisi tuntunan perawatan jenazah Covid-19 yang antara lain menegaskan agar penatalaksanaannya mengikuti protokol kesehatan; apabila dipandang perlu dan dalam rangka menghindari terjadinya paparan virus terhadap tenaga penyelenggaraan, maka jenazah dapat tidak dimandikan, serta pelaksanaan salat jenazah dapat diganti dengan salat gaib di rumah masing-masing.

Poin berikutnya adalah tentang spiritualitas dan ihsan dengan menganjurkan "banyak istigfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersalawat atas Nabi, dan kunut nazilah secara individu serta dengan keyakinan dan berbaik sangka akan ketetapan Allah, semoga Covid-19 segera diangkat oleh Allah swt."

Pada setiap tuntunan ibadah masa darurat Covid-19 dalam lampiran edaran PP Muhammadiyah tersebut di atas, selalu disertai dengan dalil-dalil *naqli* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini penting dilakukan untuk menegaskan bahwa tuntunan yang dikeluarkan tersebut tidak hanya berdasar pada argumen akal, atau semata-mata mengikuti pertimbangan protokol kesehatan, tetapi memiliki rujukan dalil/*nash* otoritatif, sahih, dan *maqbulah*.

2. *Idhul Adha dan Ibadah Kurban di Masa Pandemi*

Tanggal 24 Juni 2020 Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan edaran Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Idul Adha, dan Protokol Ibadah Kurban di Masa Pandemi Covid-19. Tuntunan ini dikeluarkan mengingat Idul Adha tahun 1441 H yang bertepatan pada Jumat Pon 31 Juli 2020M, menurut kajian para pakar kesehatan, akan berlangsung masih dalam kondisi wabah Covid-19. Karena itu, kegiatan ibadah yang biasanya melibatkan pengumpulan massa yang banyak perlu dibuatkan tuntunan khusus agar sesuai dengan protokol kesehatan.

Tuntunan ini mengatur 3 hal pokok: Pertama adalah tentang waktu pelaksanaan puasa Arafah berdasar hisab hakiki wujudul hilal Majelis Tarjih dan Tajid yang menjelaskan bahwa Puasa Arafah 9 Dhulhijjah 1414 H bertepatan dengan Hari Kamis Wage tanggal 9 Juli 2020M. Kedua adalah tentang pelaksanaan Idul Adha pada 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Jumat Pon 30 Juli 2020 agar: (a) sholat idhul Adha di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan; (2) bagi yang ingin menghendaki, sholat idhul Adha dapat dilaksanakan di rumah masing-masing; dan (3) bagi yang berada di zona hijau atau aman tidak terdampak Covid-19, sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau ruang terbuka sekitar rumah tinggal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ketiga adalah tentang ibadah kurban (penyembelihan hewan kurban/*udhiyyah*) di masa pandemi yang secara ringkas dituntunan sebagai berikut: (1) hukum berkurban adalah *sunnah muakaddah*; (2) di masa pandemi lebih diutamakan bersedekah berapa uang dari pada menyembelih hewan kurban; (3) bagi yang mampu melakukan kurban dan membantu dampak ekonomi akibat Covid maka dapat melakukan keduanya; (4) kurban sebaiknya dikonversi dalam bentuk dana dan disalurkan melalui Lazismu untuk disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan; (5) bagi yang akan berkurban dengan menyembelih hewan secara langsung maka sejak penyembelihan dan pendistribusian daging kurban agar memperhatikan protokol kesehatan (Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020).

Berdasar Edaran PP Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Idhul Adha di masa pandemi ini, Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) pada tanggal 24 Juni menggelar jumpa pers untuk menyosialisasi surat edaran tersebut. Dalam jumpa pers tersebut dijelaskan teknis pelaksanaan salat Idul Adha serta mekanisme penyembelihan dan pendistribusian daging kurban berdasar protokol kesehatan, yang antara lain menekankan: (1) melaksanakan salat Idul Adha di rumah bersama keluarga; (2) Pelaksanaan salat Idul Adha di luar rumah untuk daerah yang dinyatakan aman oleh pemerintah atau zona hijau pelaksanaannya

agar dibuat kelompok-kelompok kecil dan tidak dipusatkan di satu tempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; (3) seruan untuk tidak menyelenggarakan takbir keliling dan perjalanan luar kota termasuk dalam rangka Idul Adha; (4) tata cara penerimaan, penyembelihan, dan penyaluran hewan/daging kurban sesuai dengan protokol kesehatan seperti pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH), penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi panitia, penyediaan *hand sanitizer*, sabun, sarung tangan, dan penerapan *physical distancing*. (<https://covid19.muhammadiyah.id/tuntunan-sholat-idul-adha-di-tengah-pandemi-covid-19/>)

Dalam tuntunan Idul Adha dan tuntunan ibadah kurban tersebut di atas tergambar secara jelas bagaimana aspek ibadah keagamaan berpadu dengan pandangan sains kesehatan di masa pandemi ini. Integrasi dan interkoneksi antara agama dan sains ini satu sisi untuk menjamin bahwa kegiatan ibadah keagamaan bagi warga Persyarikatan tetap dapat dilaksanakan di masa wabah, tetapi pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan sains kesehatan.

Tentu saja perpaduan antara agama dan sains di masa pandemi ini melahirkan pelaksanaan ibadah yang berbeda dengan masa-masa normal. Inovasi keagamaan tersebut awalnya desain untuk periode waktu yang sementara, masa tanggap darurat, tetapi karena belum jelasnya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, maka lambat laun cara baru tersebut akan menjadi kebiasaan baru yang dalam periode yang cukup lama berpotensi menjadi "budaya" atau "tradisi" baru dalam cara beragama. Munculnya inovasi-inovasi baru, yang mungkin mudah dimengerti oleh pimpinan di tingkat pusat, wilayah, dan daerah, tetapi tidak jarang memunculkan keraguan bahkan penolakan dari warga dan pimpinan di tingkat cabang dan ranting.

Kondisi ini sudah disadari oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat, maka selain ditindaklanjuti dengan pernyataan *press* oleh PP Muhammadiyah dan Majelis terkait, MCCC juga membuat bahan presentasi tentang "Protokol Ibadah Qurban". PP Muhammadiyah juga menggelar pengajian umum secara daring

dengan tema "Idul Adha di masa Pandemi Covid-19". Menariknya, narasumber dalam pengajian tersebut adalah representasi dari pihak-pihak yang otoritatif di bidangnya. Pemimpin puncak organisasi tingkat pusat turun langsung, yaitu Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Ketum PP Muhammadiyah memberi pidato iftitah dan Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A., Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sebagai narasumber. Pembicara lainnya adalah representasi pemegang otoritas keulamaan di Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan representasi praktisi kesehatan yang sekaligus Wakil Ketua MCCC, dr. Ahmad Muttaqin Alim, Sp.An.

Agar tuntunan ibadah sesuai protokol kesehatan mudah dipahami oleh warga Persyarikatan dan masyarakat luas, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah juga membuat infografis dan digital *flyer/meme* versi ringkas tuntunan Idhul Adha dan ibadah kurban di masa pandemi lalu disebarakan melalui jaringan media sosial Persyarikatan Muhammadiyah seperti FB Persyarikatan Muhammadiyah, twitter @muhammadiyah, Instagram @muhammadiyah, dan website resmi www.muhammadiyah.id.

3. Agama, Sains, dan Budaya dalam Aktualisasi Islam Berkemajuan

Tuntunan keagamaan selama masa pandemi yang terbitkan oleh PP Muhammadiyah menjadi contoh bagaimana pendekatan agama dan sains digunakan untuk memecahkan masalah keagamaan dan kesehatan masa wabah. Dilihat dari perspektif integrasi dan interkoneksi keilmuan sebagaimana yang dikembangkan oleh Amin Abdullah, integrasi dan interkoneksi antara agama, sains, dan budaya praksis keagamaan Muhammadiyah masa darurat wabah Covid-19 dapat ditemukan dalam tiga corak sekaligus: *semipermeable*, *intersubjective testiability*, dan *imaginative creation*.

Corak *semipermeable* terlihat pada proses pembahasan dan lahirnya tuntunan ibadah di masa pandemi. Muhammadiyah termasuk ormas Islam yang sejak awal memberi tuntunan organisatoris dan keagamaan dalam menghadapi wabah Covid-19. PP Muhammadiyah membentuk MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Centre) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan

program dan aksi penanganan Covid-19. MCCC beranggotakan wakil-wakil Pimpinan Muhammadiyah dari berbagai majelis baik yang berkaitan langsung dengan urusan kesehatan, sosial, dan pendidikan maupun urusan keagamaan. Rapat-rapat pembahasan tuntunan keagamaan tidak hanya melibatkan majelis terkait urusan keagamaan, tetapi juga majelis lain yang menangani bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan informasi serta majelis-majelis terkait lainnya. Siaran pers MCCC tentang tuntunan keagamaan di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan melibatkan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU), Majelis Tarjih dan Tajdid, dan Majelis Tabligh. Jika permasalahan yang akan diinformasikan bersinggungan dengan pendidikan maka MCCC juga melibatkan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Hal ini menunjukkan bagaimana antara bidang keagamaan dan sains-kesehatan serta bidang-bidang lainnya di Muhammadiyah secara *semi perbiabble* saling menyapa, saling mengisi, dan saling berdialog. Pada gilirannya proses *semipermissible* ini berlanjut pada saling menguji bahkan juga memunculkan kreatif sebagaimana tampak pada uraian berikut ini.

Corak *intersubjective testiability* tampak pada pembahasan dan proses pengambilan keputusan yang selalu mempertimbangkan dimensi agama dan sains. Perspektif agama dan sains tidak sekadar didialogkan untuk melihat wabah, tetapi juga digunakan untuk saling menguji: argumen keagamaan ditinjau dari pertimbangan sains dan argumen sains ditelaah dengan pertimbangan keagamaan. Salah satu Ketua PP Muhammadiyah menjelaskan kepada penulis bahwa saat membahas edaran Salat Idul Fitri 1441 H di masa pandemi, keputusan yang diambil awalnya akan memberi opsi boleh salat di lapangan untuk daerah yang tidak terkena dampak pandemi, dan peniadaan salat di lapangan di daerah yang terdampak. Namun, mengingat pada waktu itu angka kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan tidak ada jaminan ada daerah atau wilayah di Indonesia yang betul-betul steril terbebas dari penyebaran virus Corona baru tersebut, maka dengan pertimbangan sains kesehatan, akhirnya tuntutannya dibuat tunggal dengan meniadakan salat

ied di lapangan. Keputusan ini menandakan bagaimana sains kesehatan digunakan sebagai penguji argumen keagamaan tentang anjuran salat ied di tanah lapang di masa normal.

Contoh pertimbangan sains yang diuji dengan argumen keagamaan adalah tuntunan keagamaan memasuki realitas baru atau "adaptasi kebiasaan baru". Sejak awal Muhammadiyah mengingatkan kepada pemerintah agar hati-hati dan tidak gegabah dalam mengubah status wilayah dan daerah dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi lebih longgar dengan istilah "normal baru". Pelonggaran PSBB ini memungkinkan warga untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat: memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Di masa pandemi yang masih berlanjut ini mestinya warga masih dianjurkan untuk ibadah di rumah. Namun seiring desakan dari warga dan tingginya keinginan jemaah untuk dapat melaksanakan salat jemaah dan salat Jumat di masjid dan musala, maka argumen sains-kesehatan yang tidak membolehkan berkerumun, termasuk di rumah-rumah ibadah, diuji dengan pertimbangan keagamaan tentang perintah salat jemaah dan wajibnya melaksanakan salat Jumat. Akhirnya muncullah tuntunan keagamaan memasuki realitas baru atau adaptasi kebiasaan baru dari PP Muhammadiyah yang membolehkan musala dan masjid menyelenggarakan salat jemaah dan salat Jumat, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Corak *creative imagination* dapat dijumpai pada anjuran mengonversi hewan kurban dengan dana untuk membantu penanganan Covid-19 yang disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazizmu). Imajinasi kreatif juga terlihat pada tuntunan salat jemaah dengan jarak antarjemaah minimal 1 meter; salat mengenakan masker, diperbolehkannya melaksanakan salat Juma'ah dalam satu tempat menjadi beberapa gelombang karena keterbatasan tempat dan banyaknya jemaah. Berkembang juga kegiatan, kajian, dan pengajian *online*, lomba takbir antarkeluarga yang dilaksanakan secara *online*, lomba da'iyah secara daring, dan lain sebagainya.

Di antara kegiatan ibadah secara daring yang diselenggarakan oleh warga Muhammadiyah yang cukup progresif dan fenomenal adalah pelaksanaan Jumatan *online* melalui media *zoom*. Kegiatan ini diinisiasi oleh sekelompok aktivis Muhammadiyah yang berhimpun dalam Ma'arif Institut sebagai bentuk pengejawantahan opini Ustaz Wawan Gunawan, Lc., M.Ag., salah satu pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang dimungkinkannya secara syar'i pelaksanaan salat Jumat secara daring pada masa wabah. Opini Ustaz Wawan tentang argumen dibolehkannya salat Jumat *online* ditulis di kanal berita *IBTimes.ID* sejak bulan April 2020.² Dalam perjalanannya, ikhtiar untuk memberikan layanan SJ Online dalam rangka mengakomodasi kebutuhan sebagian warga Muslim yang terdampak Covid-19 tersebut ternyata telah memunculkan kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung dan mengapresiasi, tetapi juga tidak sedikit yang menolak baik secara individu maupun atas nama institusi keagamaan, dikarenakan pelaksanaannya yang berbeda dengan kebiasaan dan pemikiran lama. Puncaknya adalah munculnya fatwa Tarjih Muhammadiyah

2 *IBTimes.ID* adalah kanal berita dan opini yang mengusung gagasan Islam moderat yang dikelola oleh anak-anak muda Muhammadiyah. Meski *IBTimes.ID* tidak memiliki hubungan struktural dengan Muhammadiyah, namun para pengelolanya adalah aktivis Muhammadiyah yang juga mengusung gagasan yang seide dengan Muhammadiyah (Islam Berkemajuan). Wawan Gunawan menulis opini di rubrik Fikih tentang Jumatan *online* sejak bulan April 2020, masing-masing: "Mungkinkah Sholat Jum'at Berjemaah secara *Online*?" (12 April 2020, <https://ibtimes.id/mungkinkah-salat-jumat-berjemaah-secara-online/>) dan "Sekali Lagi, Tidak Masalah Sholat Jum'at secara *Online*" (4 Mei 2020, <https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-salat-jumat-secara-online/>). Menurut Wawan Gunawan, pelaksanaan salat Jum'at *Online* merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Salat Idul Fitri *online* yang dilaksanakan pada 1 Syawal 1441 bertepatan 24 Mei 2020 diikuti oleh 3 keluarga, Ustaz Wawan yang tinggal di Yogyakarta sebagai khatib dan Imam, serta dua keluarga lain yang tinggal di luar Yogyakarta. Atas usulan para jemaah yang sebagian tinggal di Jakarta Salat Jumat *online* perdana dilaksanakan pada 29 Mei 2020. Awalnya diikuti oleh hanya puluhan jemaah, tetapi lambat laun berkembang menjadi ratusan jemaah. Saat penulis mengikuti salat Jumat *online* melalui *zoom* pada tanggal 1 Januari 2021, lebih dari 150 akun *zoom* sebagai peserta, sebagian akun *zoom* tersebut diikuti oleh anggota keluarga yang berjumlah 2-3 jemaah.

(02/02/2021) disusul Majelis Ulama Indonesia (MUI) (11/05/20) yang menghukumi SJ Online tidak sah.³

Inovasi cara beragama hasil dari proses *integrasi dan interkoneksi* antara agama dan sains dalam tuntunan keagamaan di masa Covid-19 ini awalnya didesain untuk masa darurat yang sifatnya sementara. Namun seiring pelaksanaan yang terus berulang, masyarakat dan warga Persyarikatan mulai terbiasa dengan cara baru tersebut yang lambat laun akan menjadi budaya dan tradisi baru. Ke depan, pemanfaatan teknologi digital akan semakin masif dan menjadi budaya baru yang tidak terpisahkan dalam praktik keagamaan.

Pengintegrasian nalar agama dan nalar sains dalam tuntunan keagamaan Muhammadiyah sebagaimana tecermin dalam maklumat dan edaran PP Muhammadiyah mendapat apresiasi dari Mark Woodward, seorang Indonesianis Amerika Serikat yang banyak melakukan riset tentang Islam di Indonesia. Dalam laman Facebook-nya yang kemudian viral di beberapa platform sosial media, Woodward menulis *Religious Holidays in the Plague Year—Lessons from the Indonesian Muhammadiyah Movement*. Menurut Woodward, kemampuan Muhammadiyah memadukan pertimbangan keagamaan dan sains untuk memberikan tuntunan ibadah di rumah serta tuntunan keagamaan yang positif (aman, sehat, dan memenuhi protokol kesehatan) diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi gereja-gereja di Amerika Serikat yang menolak seruan otoritas setempat agar untuk sementara waktu menutup tempat ibadah dan melakukan ibadah di rumah. Tulisan Woodward tersebut juga dimuat di laman *IBTimes.ID* (<https://ibtimes>).

³ Dibandingkan dengan fatwa MUI yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya salat Jumat virtual, Fatwa MTT PP Muhammadiyah dalam kesimpulannya hanya menyebutkan "belum dapat menerima pelaksanaan Salat Jumat secara *online*", menyebutkan "belum dapat menerima pelaksanaan Salat Jumat secara *online*", itu pun didahului dengan pernyataan "tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda". Pernyataan pada kesimpulan yang terkesan kurang tegas, tidak menyebut "tidak sah" dan didahului "basa-basi" penghormatan pada yang berbeda pendapat ini tampaknya terkait dengan kenyataan salah satu inisiator Salat Jumaat *online* adalah salah satu anggota MTT PP Muhammadiyah. Para khatib dan imam yang dijadwal dalam *SJ Online* juga aktivis dan pimpinan Muhammadiyah dan ortomnya.

id/religious-holidays-in-the-plague-year-lessons-from-the-indonesian-muhammadiyah-movement/).

Muhammadiyah tidak lepas dari kritik kadernya. Melalui situs *IBTimes.ID*, artikel yang berjudul "Fikih New Normal: Mengapa Fatwa Muhammadiyah Berubah?" seorang kader mengungkapkan kekecewaan pada PP Muhammadiyah. Hal itu terkait surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19. Dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 dinilai kontradiksi dengan Surat Edaran Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2020 sebelumnya yang mengimbau warga Muhammadiyah untuk menyelenggarakan ibadah di rumah. Kontradiksi tersebut seolah-olah Muhammadiyah mengizinkan kembali warganya salat berjemaah di masjid. Protokol kesehatan mengatur jarak saf, menggunakan masker, dan sebagainya tersebut, sebenarnya hal yang dikritik Muhammadiyah pada saat Surat Edaran Nomor 2 dan Nomor 3 dikeluarkan. Namun, sangat disayangkan pada Surat Edaran Nomor 5 hal tersebut diberi legitimasi. Padahal MCCC masih *keukeuh* menolak berdamai dengan Covid-19. Artikel tersebut viral dan dibaca oleh Pak Haedar. Sebagai ideolog dan organisatorik, Pak Haedar pun melakukan pembelaan terhadap fatwa Muhammadiyah. Jadi, meskipun Pak Haedar sangat bersemangat mendorong ijtihad dan pemikiran yang solutif di masa pandemi, tetapi beliau memilih jalan yang moderat dan menjunjung tinggi keputusan organisasi.

Peran positif dan aktif Muhammadiyah melalui Jihad Kemanusiaan merespons wabah Covid-19 dengan mengintegrasikan agama, sains, dan budaya menunjukkan bahwa agama dan umat beragama dapat menjadi kekuatan pemecah masalah (*problem solver*) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dapat mengurangi tensi suara miring kelompok *religiophobia* yang sering menuduh agama (baca: umat Islam) merupakan biang kerok atau sumber masalah peradaban. Dalam kesimpulan kajiannya yang membandingkan cara merespons wabah Covid-19 antara Muhammadiyah dan Jemaah Tabligh, Burhani menulis, "*The activities of Muhammadiyah during the pandemic challenge those who see religion as the antithesis of science*" (Burhani, 2020: 8). Sukidi dalam

opiniya di harian *Kompas* (2 Januari 2021) menulis bahwa peran proaktif dan kerja-kerja Muhammadiyah dalam menghadapi wabah Covid-19 dengan mengintegrasikan agama (Islam) dan sains selama ini “merupakan konsekuensi logis dari paham Muhammadiyah yang menganut Islam rasional dan pro sains”.

Respons Warga Persyarikatan dan Ujian Otoritas Keagamaan

1. Ragam Respons Warga Persyarikatan terhadap Tuntunan Ibadah di Rumah

Pada bulan Ramadhan 1441, di beberapa grup WhatsApp (WA) yang penulis ikuti, ada saja yang terus mengirim pesan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar tentang masih normalnya kegiatan keagamaan di musala atau masjid mereka di masa pandemi. Tidak jarang pesan mereka dibarengi dengan statemen “takut hanya pada Allah, sakit dan mati sudah ditentukan takdirnya oleh Allah SWT”. Menariknya lagi, yang sering mengunggah kebanggaan tetap aktifnya ibadah jemaah di tempat ibadah pada masa wabah tersebut juga sering mengirim berita-berita tentang Covid-19 dari kaca mata teori konspirasi dan menganggap imbauan agar beribadah di rumah sebagai bentuk kelompok tertentu untuk mengkerdilkan umat Islam.

Di penghujung Ramadhan 1441 H yang lalu, di medsos dan beberapa grup WA yang berafiliasi ke Muhammadiyah juga menyebar meme bertuliskan “Covid-19 Ujian Loyalitas” dengan gambar wajah laki-laki mengenakan baret merah khas KOKAM memakai masker. Di bawah gambar wajah bermasker tersebut terdapat tiga tanda hastaq bertuliskan:

#KAMI_BERSAMA_MAKLUMAT_PP

#SHOLAT_ID_DI_RUMAH

#PANTANG_MENYERAH_LAWAN_COVID

Dilihat dari konteks waktu dan isinya, meme tersebut disebarkan untuk merespons merebaknya ajakan menghadiri

penyelenggaraan salat Idul Fitri di lapangan di beberapa daerah yang ironisnya pada *flayer* tersebut dicantumkan lambang Muhammadiyah. Padahal, sudah jelas PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan seruan dan tuntunan ibadah selama darurat wabah yang salah satunya menyerukan agar salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing dan meniadakan salat Idul Fitri di lapangan, masjid, dan tempat terbuka lain yang mengumpulkan banyak jemaah.

Respons warga Persyarikatan terhadap seruan dan tuntunan ibadah di masa wabah dari PP Muhammadiyah dapat dipetakan menjadi empat kategori: Pertama, adalah kelompok warga yang mentaatinya dengan *sami'na wa atha'na*; kedua, adalah kelompok yang menolak secara halus dengan alasan-alasan tertentu; ketiga, kelompok yang menentang bahkan mendeligitimasi tuntunan, dan keempat adalah kelompok yang mentaati dengan melakukan kreativitas kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan.

Secara umum, respons warga Persyarikatan di perkotaan dan di amal-amal usaha Muhammadiyah masuk kategori kelompok pertama yang *sami'na wa tha'na* dalam mentaati tuntutan ibadah di rumah dari PP Muhammadiyah. Masjid dan musala yang berafiliasi ke Muhammadiyah dan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah tidak menyelenggarakan ibadah jemaah. Kelompok yang pertama ini secara tegas mengumumkan kepada jemaah bahwa masjid dan musala untuk sementara ditutup dan menyerukan agar ibadah dilaksanakan di rumah. Selain mengumumkan di media sosial, mereka juga memasang spanduk pengumuman di gerbang masjid bahwa untuk sementara masjid tidak dibuka untuk umum. Untuk menjaga agar masjid dan musala masih ada kehidupan, maka azan masih dikumandangkan dengan mengganti lafal "*hayaa 'ala shalah*" dengan "*shalluu fii buyuutikum*" atau "*shalluu fii rihaalikum*".

Kelompok kedua, yang menolak secara halus tuntunan PP Muhammadiyah, masih tetap menyelenggarakan ibadah jemaah di musala atau masjid dengan beragam alasan, misalnya klaim daerahnya masih masuk zona hijau, belum ada kasus dan dipandang aman. Alasan lainnya dengan menyebutkan bahwa peribadatan

dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti: tidak pakai karpet dan jemaah wajib membawa sajadah sendiri-sendiri, jarak antar jemaah minimal 1 meter, jemaah wajib mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun sebelum masuk masjid, tes suhu tubuh bagi jemaah, tidak berkelompok dan berdiam diri terlalu lama di masjid, serta jemaah tua dan anak-anak dilarang ikut.

Kelompok ketiga adalah yang menentang, bahkan mendeligitimasi tuntunan ibadah di rumah oleh Muhammadiyah. Ironisnya, penolakan bahkan “penentangan” tuntunan Pimpinan Pusat ini ada yang disponsori oleh pimpinan di tingkat ranting atau cabang. Sudah jelas PP menyerukan agar untuk sementara tidak menyelenggarakan salat jemaah lima waktu, salat Jumat, salat tarawih, dan kegiatan buka puasa bersama di masjid atau musala, tetapi beberapa masjid dan musala masih tetap menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ketika diluncurkan seruan agar tidak menyelenggarakan salat Idul Fitri di masjid atau lapangan, ternyata ada selebaran dari salah satu Pimpinan Ranting Muhammadiyah lengkap dengan logo Persyarikatan yang mengundang jemaah untuk menghadiri salat Idul Fitri di tanah lapang.

Kelompok keempat adalah yang menyikapi secara positif tuntunan PP Muhammadiyah, proaktif, dan kreatif menciptakan “budaya baru” yang memadukan antara kemajuan sains dan teknologi dengan kegiatan keagamaan. Kelompok keempat ini cerdas membaca peluang. Disaat ada seruan *social dan physical distancing*, maka kegiatan keagamaan yang sebelumnya diselenggarakan secara *offline*, ditransformasikan secara *online* menggunakan berbagai platform.

2. Tantangan Otoritas Keagamaan

Beragam respons warga peryarikatan terhadap tuntunan keagamaan Muhammadiyah di masa wabah memunculkan pertanyaan seberapa didengar dan ditatati fatwa dan tuntunan keagamaan Muhammadiyah. Jika fatwa dan tuntunannya sudah tidak lagi didengar oleh warganya, apakah Muhammadiyah mengalami degradasi otoritas keagamaannya? Mengapa otoritas

keagamaan dapat meredup dalam lingkungan organisasi yang dikenal pembaharu dan modern tersebut? Apakah kondisi disrupsi yang dipicu oleh VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menjadi penyebabnya? Apa yang harus dilakukan Muhammadiyah dan organisasi sejenis agar mampu menjaga "otoritas" keagamaannya di era VUCA ini?

Dalam satu dasa warsa terakhir ini, dalam kajian organisasi dan kepemimpinan, terutama bidang bisnis, sering disebut saat ini sedang berada pada era VUCA, istilah yang menggambarkan era yang diliputi gejolak perubahan yang sangat cepat (*volatile*), yang mengakibatkan ketidakpastian (*uncertain*), hubungan yang sangat kompleks dan tumpang tindih (*complex*), serta mengakibatkan ketidakjelasan (*ambigu*).⁴ Salah satu pemicu situasi VUCA ini adalah disrupsi informasi, buah dari kemajuan teknologi. Dalam kehidupan keagamaan, VUCA telah mengantarkan munculnya komunitas Muslim baru, yang tidak terikat oleh sekat-sekat afiliasi mazhab dan organisasi keagamaan. Cara beragama mereka cair, hibrida, dan *eclectic*. Mereka akan memilih ajaran dan fatwa mana yang lebih sesuai dengan suasana hati dan situasinya.

Kondisi ini terjadi karena tidak sedikit warga Persyarikatan yang mengalami *modernism lack*. Indikasi ke arah ini dapat dilihat dari, misalnya, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran agar beribadah di rumah selama wabah Covid-19, tetapi tidak sedikit warga yang "mbalelo" dan abai dengan seruan PP tersebut. Alasan ketidaktaatan pada seruan PP cukup beragam. Ada yang karena merasa daerahnya aman dari wabah, ada yang karena merasa kurang marem atau merasa kurang afdol apabila beribadah di rumah

⁴ "Istilah [VUCA] ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika untuk menggambarkan situasi geopolitik saat itu. Namun karena kesamaan makna, maka istilah VUCA kini diadopsi oleh dunia bisnis. ... Lebih jelasnya, *volatility* berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik. *Uncertainty* bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. *Ambiguity* didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbau dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan." <http://binakarit.com/volatility-uncertainty-complexity-ambiguity-vuca/>. (Diakses 28 Juni 2020).

selama Ramadhan, ada juga yang karena memandang argumen keagamaan yang dijadikan acuan seruan PP Muhammadiyah kurang meyakinkan, serta alasan-alasan lain yang intinya menunjukkan "ketidaktaatan" pada pimpinan Persyarikatan.

Keengganan mengikuti edaran Pimpinan Pusat di sebagian kalangan akar rumput ini dapat dibaca bahwa alam pikiran keagamaan warga Muhammadiyah cukup variatif. Di akar rumput muncul tren beragama berbasis kebiasaan yang lama-lama memunculkan konservatisme pada kebiasaan yang selama ini telah dijalankan. Hal ini terjadi karena selama warga Persyarikatan lebih fokus mengkaji fikih, tetapi melupakan ushul fikih; terlalu berpegang pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan menanggalkan Manhaj Tarjih-nya. Akibatnya, tidak sedikit warga dan masyarakat yang melupakan fikih *taisyir* yang memberikan *rukhsah* dan kemudahan dalam beribadah dalam situasi yang tidak normal.

Corak keislaman itu teraktualisasikan pada Haedar Nashir sebagai "Ketua Umum" telah meneguhkan *khittah* Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan pembaruan Islam yang menyelaraskan spirit "Islam rasional" "Islam Berkemajuan" dengan tuntutan protokol kesehatan publik. Sebagai "Imam Besar" Muhammadiyah, Haedar dalam forum-forum *online* sangat tegas berpesan "Tegakkan aturan dan disiplin protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya". Bagi Haedar Covid-19 menyangkut urusan pandemi, menyangkut virus. Karena virus itu urusan ahli-ahli epidemiologi, maka rujukannya ilmu pengetahuan. Inilah sikap beragama yang rasional dan saintifik. Dalam hal tersebut Haedar meresapi apa yang diajarkan Ahmad Dahlan sebagai perspektif "agama nalar", "akal sehat" yang difungsikan, dalam konteks kekinian, untuk membedakan urusan virus yang murni sekuler dan urusan agama yang sakral. Dalam berbagai forum, bisa dipastikan Pak Haedar selalu menyuarakan pemikiran keagamaan Majelis Tarjih dan Tajdid sudah menyediakan perangkat metodologis yang memadukan pendekatan *Burhani*, *Bayani*, dan *Irfani* agar keberagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan perkembangan zaman (*shaalihun likulli makan wa zaman*).

Penutup

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan telah merespons wabah Covid-19 dengan menggabungkan nalar agama dan nalar sains. Edaran dan tuntunan keagamaan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah selalu mendasarkan pada pertimbangan agama dan sains kesehatan. Lembaga *ad hoc* yang dibentuk untuk menangani Covid-19 (Muhammadiyah Covid-19 Command Centre /MCCC) diisi oleh tim perwakilan dari beragam latar belakang seperti pakar dan tenaga kesehatan, aktivis penanggulangan bencana, wakil lembaga *fundraising*, ahli kebijakan publik, serta ulama dan pakar keagamaan yang kompeten. Ini menunjukkan bahwa integrasi dan interkoneksi keilmuan telah dipraktikkan dalam praksis keagamaan Muhammadiyah. Wabah Covid-19 menjadi arena aktualisasi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan yang rasional, prosains, dan berorientasi pada masalah. Kemampuan memadukan nalar agama, sains, dan budaya ini tidak lepas dari karakter moderat pimpinan, aktivis, serta corak keberagaman Muhammadiyah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa aktivisme organisasi keagamaan, jika didasari oleh nalar keagamaan yang tepat dan dikelola secara "profesional" sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammadiyah, dapat menjadi bagian dari pemecah masalah *problem-problem* kehidupan sehingga mengantarkan cara beragama yang masalah.

Namun di sisi lain, perbedaan tingkat nalar keagamaan pada level pimpinan tingkat pusat dengan nalar keagamaan para pimpinan Persyarikatan di bawahnya serta warga dan simpatisan di akar rumput menjadikan edaran dan tuntunan keagamaan masa wabah dari PP Muhammadiyah masih direspons secara beragam. Munculnya suara-suara dan pesan-pesan di media sosial yang bersebarangan dengan atau setidaknya meragukan tuntunan keagamaan PP Muhammadiyah dapat menjadi indikasi mulai pudarnya otoritas keagamaan ormas Islam Berkemajuan ini. Pada kondisi seperti ini, Pak Haedar sebagai ideolog dan organisator tiada henti mengonsolidasikan aktivisme dan produk pemikiran selama pandemi Covid-19. Menghadapi kondisi seperti ini, sebagai organisasi keagamaan Pak Haedar berusaha membawa

Muhammadiyah keluar jebakan VUCA ini dengan paradigma New VUCA (*Vision, Understanding, Clarity, Adaptability/Agility*), yakni visi yang jelas dalam menghadapi perubahan yang serba cepat, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai perubahan situasi, kejelasan masalah, dan tantangan yang dihadapi, serta kemampuan untuk beradaptasi disertai kelincahan dan ketangkasan merespons berbagai masalah. Melalui MCCC dalam menghadapi wabah ini menegaskan Muhammadiyah sebagai gerakan agama yang rasional prosains dan menjadi bukti bahwa organisasi keagamaan dapat menjadi bagian dari pemecah masalah problem-problem kehidupan. ❖

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2014. "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconected Paradigm of Science", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, No. 1 (2014): 175-203.
- _____. 2019. *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Binar, R. 2020. "Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)", dalam <http://binakarir.com/volatility-uncertainty-complexity-ambiguity-vuca/> (Dikases tanggal 28 Juni 2020).
- Biyanto. 2017. "The Typology of Muhammadiyah Sufism: Tracing Its Figures' Thoughts and Exemplary Lives", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, No. 2 (2017): 221-249. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i2>.
- Burhani, Ahmad Najib. 2019. *Between Social Services and Tolerance: Explaining Religious Dynamics in Muhammadiyah*. Singapore: ISEAS Publishing.
- _____. 2020. "Comparing Tablighi Jemaat and Muhammadiyah Responses to Covid-19". ISEAS Yusof Ishak Institute *Perspektif*, No 75. Singapore, 13 July 2020.
- Gunawan, Wawan. "Mungkinkah Sholat Jum'at Berjemaah secara Online?" dalam <https://ibtimes.id/mungkinkah-salat-jumat->

- berjemaah-secara-online/* (Diakses 15 Juli 2020).
- _____. "Sekali lagi, Tidak Masalah Sholat Jum'at secara Online" dalam <https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-salat-jumat-secara-online/> (Diakses 15 Juli 2020).
- Kim, Hyung Jun. 2007. *Reformist Muslim in a Yogyakarta Village: The Islamic Transformation of Contemporary Socio-Religious Life*. Canberra: ANU Press.
- Latief, Hilman. 2012. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Utrecht: Utrecht University.
- Mack, Oliver, dkk. (Eds). 2016. *Managing in VUCA World*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Muis, Arif Jamali. "Jihad Kemanusiaan Muhammadiyah," dalam <https://covid19.muhammadiyah.id/jihad-kemanusiaan-muhammadiyah/> (Diakses 15 Juli 2020).
- Mu'ti, Abdul dan Ulhaq, Fajar Riza. 2009. *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*. Jakarta: al-Wasath Publishing House.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan, Kado Satu Abad Muhammadiyah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mutaqin, Ahmad. 2021. "Religion, Science and Culture amidst the Covid-19 Pandemic: Muhammadiyah Worship Guidance and Members Responses", *AL ALBAB* 10, no. 1 (2021). DOI: 10.24260/alalbab.v10i1.1904.
- Muttaqin, Ahmad; Ustadi Hamsah; dan Robby H. Abror. 2023. "Muhammadiyah, Sufism, and the Quest for 'Authentic' Islamic Spirituality", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 13, No. 1 (2023): 199-226.
- Nakamura, Mitsuo. 2012. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town 1910-2010*, Second Enlarged Edition. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Nashir, Haedar. 2015a. *Muhammadiyah a Reform Movement*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- _____. 2015b. *Understanding the Ideology of Muhammadiyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nashir, Haedar dan Latief, Hilman. 2020. "Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020)", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (2020): 1-20.
- Redaksi Muhammadiyah. 2020. "Tuntunan Menyambut dan Melaksanakan Shalat Idul Adha Saat Pandemi Covid-19", *Suara Muhammadiyah*, 24 Juni 2020, dalam <https://muhammadiyah.id/tuntunan-sholat-idul-adha-di-tengah-pandemi-covid-19/> (Diakses 24 Juni 2020).
- Riana, Friski. 2020. "Muhammadiyah: Tak Perlu Potong Hewan Kurban, Dana untuk Covid-19", *tempo.co*, 21 Juni 2020, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1356051/muhammadiyah-tak-perlu-potong-hewan-kurban-dana-untuk-covid-19> (Diakses 21 Juni 2020).
- Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Coronavirus Disease (Covid-19)
- Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/I.0/B/2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Fardu Berjemaah Saat Terjadi Wabah Coronavirus Disease (Covid-19).
- Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan Protokol Ibadah Kurban pada Masa Pandemi Covid-19.
- Sukidi. 2021. "Muhammadiyah, Sains dan Kesehatan Publik", *Kompas*, 2 Januari 2021.

- Tim Diseminasi Informasi dan Publikasi MCCC. 2000. *Optimis Menghadapi Pandemi Covid-19: Catatan Kajian dan Respons Muhammadiyah* (E-book). Yogyakarta: MCCC.
- Woodward, Mark. 2020. "Religious Holidays in the Plague Year - Lessons from the Indonesian Muhammadiyah Movement". Dalam <https://ibtimes.id/religious-holidays-in-the-plague-year-lessons-from-the-indonesian-muhammadiyah-movement/> (Diakses 15 Juli 2020).